

**PERANAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PEDESAAN TERHADAP PENINGKATAN USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH DI KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG
DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI)
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**



DISUSUN OLEH :

MUHAMMAD ZAKIR

NIM: 10725000002

**PROGRAM SI
JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1432H/2011 M**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul, **“Peranan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Bangkinang Seberang Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam”**. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*Field Research*) di PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, apa peranan PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang dalam upaya meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Bangkinang Seberang, apa saja kendala-kendala yang dihadapi PNPM Mandiri Pedesaan, dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap peranan program PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang dalam upaya meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Bangkinang Seberang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan PNPM Mandiri Pedesaan dalam upaya meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Bangkinang Seberang, mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh PNPM Mandiri Pedesaan, serta untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap peranan PNPM Mandiri Pedesaan dalam upaya meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Bangkinang Seberang.

Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola PNPM Mandiri Pedesaan dan seluruh nasabah PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang yaitu sebanyak 540 orang. Sedangkan sebagai sampelnya penulis mengambil sebanyak 10% atau 54 orang nasabah ditambah dengan 5 orang pengelola PNPM Mandiri Pedesaan dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan wawancara dan angket yang diambil dari lokasi penelitian, ditambah dengan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif.

Adapun hasil dari penelitian ini, bahwa PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang mempunyai peranan yang sangat penting terhadap peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Bangkinang Seberang. Program yang berperan langsung dalam peningkatan UMKM ini adalah Simpan Pinjam Khusus Perempuan. Hal ini terbukti, 45 orang atau 83 % responden dari angket yang disebarkan menyatakan bahwa program PNPM Mandiri Pedesaan yang dicanangkan oleh pemerintah sangat baik terutama dalam hal peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh PNPM Mandiri Pedesaan adalah, karena kurangnya keaktifan masyarakat dalam mengikuti Musyawarah Antar Desa (MAD), karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan pinjaman dari PNPM Mandiri Pedesaan, dan karena masih belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Pedesaan.

Dalam Islam, kita sangat dianjurkan untuk senantiasa berusaha dan bekerja. Karena Allah SWT tidak akan merubah nasib kita, sehingga kita sendiri yang berusaha untuk merubahnya. Walaupun pada praktiknya PNPM Mandiri Pedesaan

menggunakan bunga, namun bagi masyarakat terutama para pelaku UMKM mereka tidak merasa diberatkan dalam hal pengembalian dana yang dipinjamkan. Kemudian dengan adanya program pinjaman dari PNPM Mandiri Pedesaan ini terwujudnya kehidupan yang saling tolong menolong, dan ini juga merupakan hal yang sangat dianjurkan oleh agama kita yang mulia ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SKRIPSI	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	12

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. PROFIL KEC. BANGKINANG SEBERANG

I. Demografi dan Geografi	15
II. Kehidupan Beragama.....	18
III. Pendidikan.....	20
IV. Adat Istiadat	23

B. PNPM MANDIRI PEDESAAN KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG

1. Gambaran Umum PNPM Mandiri Pedesaan Kec. Bangkinang Seberang 25
2. Visidan Misi PNPM Mandiri Pedesaan Kec. Bangkinang

Seberang.....	25
3. Pengelola serta tugas-tugas pengelola PNPM Mandiri Pedesaan Kec. Bangkinang	
Seberang.....	26

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Peran dan Cakupan Peran	30
B. Usaha Mikro Kecil Menengah.....	31
1. Pengertian dan Ciri-Ciri Usaha Kecil	31
2. Peran dan Fungsi Usaha Kecil	34
3. Kriteria-Kriteria Usaha Kecil Menengah.....	34
4. Kelebihan, Kekurangan dan Hambatan Usaha Kecil.....	35
5. Langkah Strategis Penguatan Usaha Mikro Kecil	
Menengah.....	40
6. Undang-Undang dan Peraturan Tentang Usaha Kecil	40
C. PNPM Mandiri Pedesaan.....	41
1. Pengertian PNPM Mandiri Pedesaan.....	41
2. Tujuan PNPM Mandiri Pedesaan.....	41
3. Prinsip PNPM Mandiri Pedesaan.....	42

BAB IV : PERANAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN TERHADAP PENINGKATAN USAHA MIKRO

KECILMENENGAH DI KECAMATAN BANGKINAG SEBERANG DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

- A. Peranan PNPM Mandiri Pedesaan dalam upaya peningkatan UMKM di Kec.
Bangkinang Seberang45
- B. Kendala-kendala yang dihadapi PNPM Mandiri Pedesaan dalam upaya
peningkatan UMKM di Kec. Bangkinang Seberang57
- C. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap peranan PNPM Mandiri Pedesaan dalam
upaya peningkatan UMKM di Kec. Bangkinang Seberang60

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan65
- B. Saran66

DAFTAR PUSTAKA.....68

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

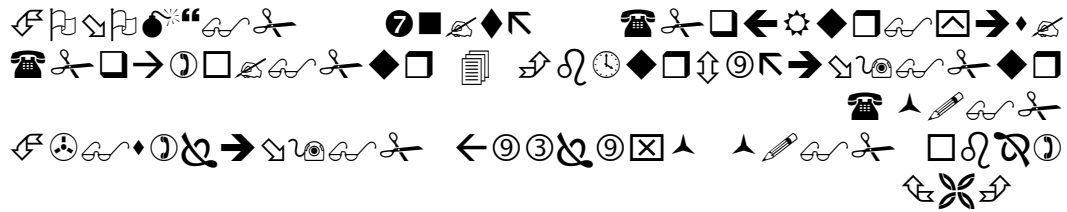
Permasalahan yang hingga saat ini belum bisa terselesaikan di negara kita adalah menyangkut pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Kehidupan ekonomi hanya melakukan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi yang dilakukan masih sederhana. Seiring dengan perkembangan zaman populasi manusia mengalami pertumbuhan, sehingga kegiatan ekonomi juga mengalami perkembangan.

Di Indonesia, perdebatan tentang masalah konsep ekonomi kerakyatan terus berlangsung. Banyak pihak yang mengatakan bahwa ekonomi kerakyatan sebagai dasar pijakan pembangunan kedepan akan mengakibatkan pertumbuhan akan menjadi lamban. Dengan demikian, kita semestinya menempatkan sektor ekonomi rakyat sebagai soko guru ekonomi nasional¹.

Di dalam ajaran agama islam anjuran untuk saling tolong-menolong adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia bahkan sangat dianjurkan terutama sekali tolong-menolong dalam hal kebaikan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi :



¹ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII press, 2000), Cet. Ke-1, h. 107.



Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalm (mengerjakan) kebajikan dan ketaqwaan, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (al-Ma’idah: 2)².

Para pakar ekonomi merumuskan tujuan kegiatan ekonomi secara terperinci. Tujuan ini meliputi tujuan yang bersifat pribadi (individu) dan sosial (masyarakat). Tujuan pribadi yang dibolehkan antara lain pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarga. Menabung untuk jaminan hari tua dan keinginan untuk meninggalkan warisan bagi keturunan amat dianjurkan, sebagai tujuan usaha produktif yang dibenarkan. Memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) pada dasarnya menjadi kewajiban setiap orang³.

Tujuan kegiatan ekonomi yang bersifat sosial antara lain adalah memberantas kemiskinan masyarakat, pemberantasan kelaparan dan kemelaratan, pemberantasan penyakit dan pelayanan kesehatan yang memadai serta mobilisasi dan untuk memperkuat tujuan yang terpuji dalam kegiatan ekonomi sosial.⁴

Perekonomian rakyat pada hakikatnya merupakan padanan istilah ekonomi rakyat yang berarti perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat.

² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sinar Baru Lagesindo, 2007), Cet. Ke-2, h. 85.

³ Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru : Alaf Riau, 2007), h. 6.

⁴ *Ibid*

Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah usaha ekonomi yang menjadi sumber penghasilan keluarga atau orang-perorang. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat, berarti perekonomian nasional berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas dalam menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Adapun bentuk perekonomian yang dilakukan langsung oleh rakyat atau kemandirian perekonomian adalah dengan membuka usaha-usaha rakyat atau disebut juga dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).⁵

Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, serta dapat menyerap tenaga kerja. Pertumbuhan usaha kecil akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja, pengurangan jumlah kemiskinan, pemerataan dalam distribusi pendapatan, dan pembangunan ekonomi.⁶

Ada tiga unsur penting dari pembangunan ekonomi, yaitu sebagai berikut :

1. Pembangunan ekonomi mengandung suatu proses perubahan terus menerus.

⁵ Sumodiningrat, Gunawan, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, (Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Umum, 1998)

⁶ Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2003), h. 36-37.

2. Pembangunan ekonomi berupaya untuk meningkatkan pendapatan perkapita GNP perkapita masyarakat. Upaya untuk menaikkan pendapatan perkapita tersebut harus berlangsung dalam jangka waktu yang panjang⁷.

Pembangunan ekonomi di Indonesia tidak lepas dari peranan sektor industri. Peranan sektor industri sangat mempengaruhi kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia⁸. Hal ini akan memberikan kemajuan yang sangat penting bagi kegiatan pembangunan ekonomi pedesaan.⁹

Lemahnya kemampuan manajerial dan sumber daya manusia ini mengakibatkan pengusaha kecil tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik. Secara ekonomi, masalah mendasar yang dihadapi oleh pengusaha kecil adalah :

1. Kelemahan dalam memperoleh dalam peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar.
2. Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan.
3. Kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia.
4. Pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil.

⁷ Abdul Hakim, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta : Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004), Cet ke-2, h. 20.

⁸ Mudjarad Kuncoro, *Ekonomi Industri Indonesia Menuju Negara Industri 2030* (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2007), Cet ke-1, h. 103.

⁹ Ronald Lapcham, *Pengusaha Kecil dan Menengah di Asia Tenggara*, (Jakarta : LP3ES Anggota IKPI, 1991), Cet ke-1, h. 142.

Menyikapi kenyataan tersebut pemerintah dalam hal ini kementerian dalam negeri merintis suatu program yang diharapkan dengan adanya program ini dapat membantu untuk memperkuat modal dan untuk pengembangan usaha kecil yang telah dilakukan oleh masyarakat. Program tersebut bernama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri ini ada beberapa macam, salah satunya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan. PNPM Mandiri Pedesaan ini dikukuhkan secara resmi pertama kali oleh Presiden pada tahun 2007 di kota Palu, Sulawesi Tengah. PNPM Mandiri Pedesaan ini beroperasi dengan adanya surat Menteri Dalam Negeri No. 414.2/2634/PMD perihal tentang Petunjuk Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Kecamatan Bangkinang Seberang ini, mulai beroperasi sejak tahun 2008 sampai sekarang. Adapun nilai flapound yang dipinjamkan kepada nasabahnya adalah sebanyak Rp. 3000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang jangka waktu pengembaliannya ditetapkan selama 1 tahun dengan bunga sebesar 13%/tahun, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)¹⁰.

Sebelum adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan ini, para pelaku UMKM di Kecamatan Bangkinang Seberang usaha

¹⁰ Muhammad Ihsan, Ketua UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kec. Bangkinang Seberang, *Wawancara*, 8 Maret 2011.

yang mereka jalankan hanya berskala kecil saja. Hal ini dikarenakan keterbatasan dari modal yang mereka miliki, setelah adanya PNPM Mandiri ini maka sekarang usaha mereka telah berkembang, karena adanya tambahan modal sehingga pendapatan yang mereka terima dan dapatpun relatif lebih besar. Artinya, dari yang dahulunya pelaku UMKM telah mempunyai usaha, sekarang dengan adanya pinjaman dari PNPM Mandiri Pedesaan, maka usaha mereka menjadi berkembang¹¹.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam peningkatan UMKM di Kecamatan Bangkinang Seberang, terutama sekali dalam peningkatan omset dan modal dalam mengembangkan usaha yang telah dijalankan. Walaupun peningkatan UMKM itu tidak semata-mata karena adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan ini, namun bagi masyarakat terutama pelaku UMKM sangat merasakan manfaat dari keberadaan program ini, terbukti dengan semakin banyaknya masyarakat yang melakukan pinjaman di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan ini.

Semenjak keberadaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang, dirasakan oleh masyarakat khususnya para pelaku UMKM sangat membantu dalam menjalankan

¹¹ *Ibid*

usaha yang dijalankan¹². Terutama sekali dapat meningkatkan usaha yang telah dijalankan.

Menurut Buk Eti, yang merupakan salah seorang nasabah dari PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang, bahwa dengan adanya pinjaman dari PNPM Mandiri Pedesaan ini usaha yang telah dia lakukan bisa lebih berkembang. Karena Ibu Eti tersebut dapat menambah usahanya¹³. Karena sebelum adanya pinjaman dari PNPM Mandiri Pedesaan Ibu Eti hanya menjual beberapa jenis makanan dan minuman untuk sarapan saja. Sedangkan setelah Ibu Eti tersebut mendapatkan modal, sekarang dia telah bisa menjual berbagai macam jenis makanan dan minuman bahkan juga menjual alat-alat tulis serta beberapa kebutuhan sehari-hari¹⁴.

Walaupun Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam peningkatan UMKM di Kecamatan Bangkinang Seberang, tetapi masyarakat masih banyak juga yang tidak mau untuk mempergunakannya bahkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya keberadaannya. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik mengangkat penelitian ini dengan judul : **“PERANAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN TERHADAP PENINGKATAN**

¹² *Ibid*

¹³ Eti (nasabah PNPM Mandiri Pedesaan), *Wawancara* Hari Kamis Tanggal 10 Maret 2011

¹⁴ *Ibid*

USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas dan agar pembahasan lebih lanjut dapat dipahami maka penulis membatasi tulisan ini hanya pada program PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang untuk tahun 2010.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan asal yang telah ditetapkan, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Apa peranan PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang dalam upaya meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Bangkinang Seberang?
- b. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang dalam upaya meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Bangkinang Seberang?

- c. Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap upaya Program PNPM Mandiri Pedesaan dalam upaya meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Bangkinang Seberang?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui peranan PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang dalam upaya meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Bangkinang Seberang.
- b. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menjadi kendala PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang dalam upaya meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Bangkinang Seberang.
- c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap upaya program PNPM Mandiri Pedesaan dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Bangkinang Seberang.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain :

- a. Sebagai bahan kajian, rujukan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidag ekonomi.

- b. Dapat dijadikan solusi untuk membantu PNPM Mandiri Pedesaan dalam upaya meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah masyarakat di Kecamatan Bangkinang Seberang.
- c. Dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang peranan PNPM Mandiri Pedesaan dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Bangkinang Seberang.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah bersifat lapangan (*field research*). Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang yang terletak di Jl. KH. Nur Mahyuddin serta masyarakat yang menjadi nasabah PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Sebagai subjek penelitian adalah pengurus dari PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang, serta masyarakat yang melakukan peminjaman di PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang.

- b. Sebagai objek penelitian ini adalah pada program PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang untuk tahun 2010 dalam upaya meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pengurus dan seluruh nasabah yang terkait dengan bantuan PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang yang berjumlah 545 orang, yang terdiri dari 5 orang pengurus PNPM Mandiri Pedesaan dan 540 orang nasabah. Sedangkan sampelnya penulis mengambil sebanyak 10%, yaitu sebanyak 54 orang dari nasabah PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang dengan menggunakan metode *purposive sampling*¹⁵. Yaitu pengambilan sampel secara tidak acak sesuai dengan kepentingan dan tujuan penelitian.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperlukan terdiri dari :

1. Data primer

Yaitu data yang diperoleh dari tempat lokasi penelitian yaitu Program nasional pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan yang terletak di Jl. KH. M. Nur Mahyuddin Kecamatan Bangkinang Seberang serta masyarakat yang menjadi nasabah dari PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang.

¹⁵ Nur Indriantoro & Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002), Cet. Ke-2, h. 131.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen – dokumen dan artikel- artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan pengelola PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang serta masyarakat yang menjadi nasabah PNPM Mandiri Pedesaan guna melengkapi data yang diperlukan tentang peranan PNPM Mandiri Pedesaan dalam upaya meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Bangkinang Seberang.

2. Angket

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara membagikan daftar pertanyaan kepada nasabah PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang agar nasabah tersebut memberikan jawabanya.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif, yakni setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka

penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

7. Metode Penulisan

Untuk mengolah dan menganalisis data yang telah terkumpul penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

- a. Metode deduktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode deskriptif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi atau menambah sedikitpun.

F. Sistematika Penulisan

Agar laporan ini tersusun secara sistematis dan terarah maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN PNPM MANDIRI PEDESAAN

Dalam bab ini penulis memaparkan tentang: Profil Kecamatan Bangkinang Seberang, Gambaran Umum PNPM Mandiri

Pedesaan, dan Pengelola serta TPNPM Tugas Pengelola Mandiri
Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini merupakan uraian dari segi teori dari penelitian ini yang berkenaan dengan: Pengetian Peranan, Pengertian UMKM, Peran dan Fungsi UMKM, Kelebihan dan Kekurangan UMKM, Undang-Undang dan Peraturan Tentang UMKM, Pengertiann PNPM Mandiri Pedesaan, Tujuan PNPM, Strategi dan Prinsip PNPM, serta dasar Hukum PNPM Mandiri Pedesaan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian meliputi: Peranan PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Upaya Peningkatan UMKM, Kendala Yang Dihadapi Oleh PNPM Mandiri Pedesaan, dan Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Peranan PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Upaya Peningkatan UMKM di Kecamatan Bangkinang Seberang.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup, dimana pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian serta saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Kecamatan Bangkinang Seberang

I. Geografi dan Demografi

Kecamatan Bangkinang Seberang merupakan kecamatan yang baru berdiri yang diresmikan pada tanggal 16 Desember 2006 terpisah dari kecamatan induknya yaitu Kecamatan Bangkinang. Pemisahan kecamatan ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 22 Tahun 2003 tanggal 10 November 2003 tentang pembentukan Kecamatan Bangkinang Seberang, Salo, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Kampar Timur, Kampar Kiri Tengah, Gunung Sahilan, dan Perhentian Raja.¹

Wilayah Kecamatan Bangkinang Seberang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 22 tahun 2003 masing-masing berbatas dengan :

1. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Tapung
2. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Kampar Utara
3. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Bangkinang
4. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Salo.

Kecamatan Bangkinang Seberang terletak antara 00.3⁰⁰ sampai 00.20⁰⁰ Lintang Utara dan 100.55⁰⁰. Bujur Timur, Kecamatan Bangkinang Seberang

¹ Sumber Data : Kantor Camat Bangkinang Seberang

merupakan dataran rendah, perbukitan serta daerah yang dialiri oleh sungai Kampar. Keadaan geografis alam Kecamatan Bangkinang Seberang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan sehingga yang menjadi komoditi utama adalah sawit, karet, padi sawah, perikanan dan hasil galian²

Kecamatan Bangkinang Seberang mempunyai luas 13 Km² atau 16. 687 Ha. Untuk lebih jelasnya penggunaan tanah dan perkebunan setiap desa/kelurahan tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL I
PENGUNAAN TANAH DAN PERKEBUNAN SETIAP
DESA/KELURAHAN TAHUN 2009

NO	DESA/KEL	TANAH SAWAH	TANAH PERKEBUNAN	PEMUKIMAN	LAIN-LAIN
1	Pulau Lawas	-	365 Ha	462 Ha	140 Ha
2	Muara Uwai	-	1.153 Ha	567 Ha	382 Ha
3	Pulau	113 Ha	345 Ha	458 Ha	322 Ha
4	Pasir Sialang	197 Ha	1.625 Ha	908 Ha	1.763 Ha
5	Bkt Sembilan	-	603 Ha	197 Ha	16 Ha
6	Laboi Jaya	-	1.502 Ha	607 Ha	335 Ha
7	Suku Mulya	-	786 Ha	438 Ha	291 Ha
8	Bukit Payung	-	903 Ha	520 Ha	217 Ha
9	Binuang	85 Ha	124 Ha	188 Ha	3 Ha
JUMLAH		613 Ha	7. 610 Ha	5.145 Ha	3.319 Ha

Sumber : Dokumen Kecamatan Bangkinang Seberang

Dari tabel di atas tergambar bahwa penggunaan tanah lebih banyak terpakai untuk lahan perkebunan, yaitu sekitar 7.610 Ha atau 45,60% penggunaan tanah untuk pemukiman, yaitu sekitar 5.145 Ha atau 30, 83% untuk lahan yang belum digarap sekitar 3.319 Ha atau 19,88% dan tanah persawahan sekitar 613 Ha atau 3,67%.

² Sumber Data : Kantor Camat Bangkinang Seberang

Komoditi perkebunan yang terdapat di Kecamatan Bangkinang Seberang yaitu : Karet, Kelapa Sawit, dan Kelapa. Untuk lebih jelasnya perkebunan rakyat yang ada disetiap Desa/Kelurahan Tahun 2009 seperti yang terdapat pada tabel berikut :

TABEL II
KOMODITI PERKEBUNAN YANG TERDAPAT DI KECAMATAN
BANGKINANG SEBERANG

No	DESA/KEL	JENIS USAHA PERKEBUNAN (HA)				JUMLAH
		KARET	K. SAWIT	KELAPA	KOPI	
1	Pulau Lawas	-	82	16	1	99
2	Muara Uwai	334	85	23	-	542
3	Pulau	206	170	15	2	393
4	Pasir Sialang	964	1.414	23	3	2.404
5	Bkt Sembilan	23	194	-	-	217
6	Laboi Jaya	30	122	-	-	152
7	Suku Mulya	68	113	2	-	183
8	Bukit Payung	28	152	-	-	180
9	Binuang	74	78	7	1	160
TOTAL		1.727	2.510	86	7	4.330

Sumber data : Dokumen Kecamatan Bangkinang Seberang

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa mayoritas usaha masyarakat Bangkinang Seberang adalah karet dan sawit, hal ini dapat dilihat dari luasnya areal tanah yang dijadikan sebagai lahan perkebunan.

Sedangkan untuk hasil tambang Kecamatan Bangkinang Seberang mempunyai lokasi galian yang sangat efektif dan membantu perekonomian rakyat serta mengurangi angka pengangguran, namun saat ini keberadaan tambang galian sudah mulai merusak keseimbangan lingkungan hidup yang bisa mengakibatkan bencana sewaktu-waktu akibat banyaknya penambang liar.

Kondisi alam yang banyak sungai dan rawa juga mengakibatkan masyarakat berternak kerbau yang dilepas dirawa.

Penduduk Bangkinang Seberang sebagian besar merupakan penduduk asli yang sudah turun temurun menetap di Kecamatan Bangkinang Seberang. Menurut monografi tahun 2010 penduduknya berjumlah 28.356 Jiwa yang terdiri dari masyarakat tempatan dan masyarakat pendatang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

TABEL III
JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG
BERDASARKAN DESA/KELURAHAN

NO	DESA/KELURAHAN	JLH PENDUDUK	JLH KK
1	Pulau Lawas	2. 901 Jiwa	727
2	Muara Uwai	3. 511 Jiwa	765
3	Pasir Sialang	8. 034 Jiwa	2. 218
4	Pulau	3.078 Jiwa	772
5	Suka Mulya	2. 373 Jiwa	597
6	Laboi Jaya	2. 645 Jiwa	720
7	Bukit Payung	2. 494 Jiwa	619
8	Bukit Sembilan	1.604 Jiwa	383
9	Binuang	1.707 Jiwa	400
JUMLAH		28. 356 Jiwa	7. 201 KK

Sumber data : Monografi Kecamatan Bangkinang Seberang

Dari jumlah penduduk di atas tergambar bahwa desa Pasir Sialang merupakan penduduk yang terbanyak dibandingkan dengan delapan desa lainnya yaitu sebanyak 8.034 jiwa atau 28,33%.

II. Kehidupan Beragama

Agama mempunyai peranan penting di dalam kehidupan manusia, karena kehidupan manusia di alam raya ini ibarat sebuah lalu lintas, dimana masing-masing ingin berjalan dengan selamat dan sekaligus ingin cepat sampai ketempat tujuan. Untuk itu manusia memerlukan peraturan dan undang-undang yaitu agama yang dapat dijadikan petunjuk dan tuntutan di dalam kehidupan manusia.

Penduduk Kecamatan Bangkinang Seberang mayoritas beragama Islam, hanya sebagian kecil saja yang beragama Kristen, Katolik dan Hindu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL IV
KLASIFIKASI PENDUDUK KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG
MENURUT AGAMA DAN KEPERCAYAANNYA

NO	DESA/KEL	PENDUDUK MENURUT AGAMA			
		ISLAM	KRISTEN	KATOLIK	HINDU
1	Pulau Lawas	2.901	-	-	-
2	Muara Uwai	3.511	-	-	-
3	Pulau	3.078	-	-	-
4	Pasir Sialang	7.188	612	234	-
5	Bkt Sembilan	1.604	-	-	-
6	Laboi Jaya	2.606	48	-	-
7	Suku Mulya	2.299	74	-	-
8	Bukit Payung	2.284	97	79	34
9	Binuang	1.707	-	-	-
JUMLAH		27.178	831	313	34

Sumber data : Monografi Kecamatan Bangkinang Seberang

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Islam adalah agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kecamatan Bangkinang Seberang yaitu sebanyak 27.178 orang (95%).

Penduduk Kecamatan Bangkinang Seberang mayoritas beragama Islam, kehidupan keagamaan berkembang dengan baik dan mengalami peningkatan diberbagai bidang. Hal ini terbukti dengan terdapatnya sejumlah rumah ibadah. Rumah ibadah tersebut selain digunakan untuk kegiatan ibadah, juga dimanfaatkan sebagai tempat belajar Al-Qur'an dan wirid pengajian serta kegiatan agama lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL V
JUMLAH TEMPAT IBADAH DI KECAMATAN BANGKINANG
SEBERANG TAHUN 2010

NO	DESA/KEL	RUMAH IBADAH			
		MASJID	SURAU	GEREJA	PURA
1	Pulau Lawas	3	5	-	-
2	Muara Uwai	5	6	-	-
3	Pulau	3	6	-	-
4	Pasir Sialang	7	2	-	-
5	Bkt Sembilan	2	4	-	-
6	Laboi Jaya	3	4	-	-
7	Suku Mulya	3	5	1	-
8	Bukit Payung	2	6	-	-
9	Binuang	1	1	-	-
JUMLAH		29	39	1	-

Sumber data : kantor Camat Bangkinang Seberang

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa masjid dan surau lebih banyak didirikan di setiap desa/kelurahan yaitu 29 buah masjid dan 39 buah surau. Sedangkan gereja hanya 1 buah yang terdapat di Desa Suka Mulya yang

sampai saat ini belum memiliki izin dan pengajian yang diadakan oleh jemaatnya secara tertutup dan agak jauh dari pemukiman penduduk.

III. Pendidikan

Penduduk Kecamatan Bangkinang Seberang pada umumnya sudah mengerti akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka sehingga anak-anak yang berada dalam usia sekolah rata-rata sudah mengecap pendidikan di sekolah negeri maupun swasta.

Sikap yang beranggapan tidak pentingnya pendidikan sudah ditinggalkan oleh penduduk Kecamatan Bangkinang Seberang, dengan kesadaran yang mereka tunjukkan dapat memudahkan tugas pemerintah dalam mencanangkan dan melaksanakan wajib belajar bagi anak-anak yang berada dalam usia sekolah.

Penduduk Kecamatan Bangkinang Seberang yang berjumlah 28.356 Jiwa sebagian besar berpendidikan tamat SD, SLTP, SLTA dan sebagian kecil saja yang sampai keperguruan tinggi. Untuk lebih jelasnya tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Bangkinang Seberang dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL VI
KLASIFIKASI PENDUDUK KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Tidak Sekolah	2.836	10 %
2	TK	567	2 %
3	SD	18.431	65 %
4	SLTP	1.985	7 %
5	SLTA	3.119	11 %
6	Perguruan Tinggi	1.418	5 %
	JUMLAH	28.356	100 %

Sumber data : Monografi Kecamatan Bangkinang Seberang tahun 2009/2010.

Dari tabel di atas dapat kita ketahui generasi yang tergolong berpendidikan di Kecamatan Bangkinang Seberang lebih kurang 24.953 orang atau sekitar 87,99%, dan jumlah penduduk yang belum dapat menamatkan pendidikan, yaitu sekitar 2% dan belum sekolah masih cukup besar mencapai 2.836 orang atau sekitar 10%

Untuk melaksanakan wajib belajar, pemerintah telah mengadakan dan mendirikan sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung sekolah, mendatangkan guru, serta buku-buku bacaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL VII
PRASARANA PENDIDIKAN UMUM (NEGERI) DI KECAMATAN
BANGKINANG SEBERANG

NO	PRASARANA	JUMLAH
1	PLAY GRUP	8
2	TK	8
3	SD	22
4	SDLB	1
5	SLTP	4
6	SLTA	1

Sumber data : Monografi Kecamatan Bankinang Seberang.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana dan fasilitas umum yang ada di Kecamatan Bangkinang Seberang terdapat 8 unit Play Group, 8 unit Taman

Kanak-Kanak, 22 unit Sekolah dasar, 1 unit SDLB, 4 unit SLTP, dan 1 unit SLTA.

Disamping pendidikan umum, terdapat pula sekolah pendidikan agama yaitu :

TABEL VIII
PRASARANA PADA SEKOLAH PENDIDIKAN AGAMA BANGKINANG SEBERANG

NO	PRASARANA	JUMLAH
1	MDA	7
2	MTS	4
3	MAS	2
4	PASANTREN	2

Sumber data : Monografi Kecamatan Bangkinang Seberang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana dan fasilitas pendidikan agama (swasta) yang ada di Kecamatan Bangkinang Seberang terdapat 7 unit MDA, 4 unit MTS, 2 unit MAS, serta 2 unit Pesantren.

Dilihat dari jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Bangkinang Seberang ini, banyaknya sarana pendidikan belum menampung anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan keterbatasan prasarana yang ada maka sebagian besar anak yang lulus sekolah menengah atas melanjutkan pendidikannya ketempat lain atau kota lain, seperti Kota Pekanbaru, Padang, dll.

IV. Adat Istiadat dan Sosial Budaya

Indonesia terkenal dengan keanekaragaman suku bangsa, bahasa, adat istiadat dan kebudayaan. Begitu juga halnya Kecamatan Bangkinang Seberang

yang terdiri dari berbagai suku, seperti : Suku Melayu, Mandeliong, Domo, Piliang, Batak, Minang, dll. Walaupun berbeda suku, namun dalam kehidupan sehari-hari mereka hidup rukun dan damai tanpa ada perpecahan antara satu dengan lainnya.

Sistem kekerabatan atau kekeluargaan di Kecamatan Bangkinang Seberang adalah berdasarkan garis keturunan ibu (Matrilineal), sehingga setiap anak dan kemenakan lebih dekat dan akrab dengan ibu dan saudara ibu serta kerabat dari pihak ibu. Begitu juga pola persukuan anak yaitu mengikuti suku ibunya.

Kecamatan Bangkinang Seberang terdapat berbagai macam tradisi yang melekat pada masyarakat diantaranya, yaitu:³

1. Hari raya enam yang juga disebut Ziarah Kubur

Tradisi ziarah kubur biasanya dilakukan sebagian masyarakat Kabupaten Kampar, pada bulan Syawal setelah puasa enam. Dalam tradisi ziarah kubur ini masyarakat berbondong-bondong khususnya kaum laki-laki datang ke kuburan dalam rangka membacakan do'a untuk arwah-arwah kaum muslimin yang telah berpulang kerahmatullah, selanjutnya pada waktu tengah hari diadakan makan *Baselo* secara bersama di surau atau di masjid yang mana hidangannya telah disediakan oleh kaum ibu-ibu dari setiap

³ Sumber Data : Kantor Camat Bangkinang Seberang

rumah. Demikian juga halnya dengan masyarakat Kecamatan Bangkinang Seberang yang melakukan hari raya enam dan ziarah kubur.

2. Upacara kematian

Apabila ada warga yang meninggal dunia, maka warga yang lainnya berbondong-bondong untuk berta'ziah dengan membawa beras dan secerek air yang digunakan untuk keperluan mengurus jenazah. Setelah tujuh hari berselang, masyarakat kembali diundang untuk mendoa'akan si mayat, demikian juga untuk 14 hari bahkan sampai 100 hari kematian.

3. Balimau kasai

Tradisi balimau kasai dilakukan dalam rangka ikut bersuka cita ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadhan, dimana tradisi ini hampir terdapat pada sebagian besar masyarakat di wilayah daerah Kabupaten Kampar.

Dalam tradisi ini biasanya masyarakat berbondong-bondong menuju tempat yang telah ditentukan yang diiringi dengan dzikir disertai dengan sampan hias yang memadati sungai Kampar. Tradisi ini merupakan tradisi yang paling ramai pengunjungnya, jika dibandingkan dengan tradisi-tradisi lainnya yang ada di daerah ini.

B. PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang

1. Gambaran Umum PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang

PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Bangkinang Seberang ini, mulai beroperasi sejak tahun 2008 sampai sekarang. Adapun kegiatan yang dilakukan semuanya merujuk kepada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang telah diatur langsung dari PNPM Mandiri Pedesaan Pusat. Bentuk program yang telah dilaksanakan adalah pembangunan infrastruktur, pemberian beasiswa, dan simpan pinjam khusus perempuan.

2. Visi dan Misi PNPM Mandiri Pedesaan

a. Visi PNPM Mandiri Pedesaan

Adapun Visi dari PNPM Mandiri Pedesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Adapun maksud dari visi ini adalah : Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada dilingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan⁴.

b. Misi PNPM Mandiri Pedesaan

Adapun misi dari PNPM Mandiri Pedesaan ;

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya.
2. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif.
3. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah local.

⁴ Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan

4. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat.
5. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan⁵.

Dalam rangka visi dan misi PNPM Mandiri Pedesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Pedesaan yaitu menjadikan rumah tangga miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa.

3. Pengelola Serta Tugas-Tugas Pengelola PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Bangkinang Seberang

a. Fasilitator

Dalam PNPM Mandiri Pedesaan fasilitator mengandung pengertian untuk membantu dan menguatkan masyarakat agar dapat dan mampu mengembangkan diri untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Adapun fungsi-fungsi pokok dari seorang fasilitator di PNPM Mandiri Pedesaan ini adalah :

1. Sebagai Narasumber

artinya seorang fasilitator harus mampu menyediakan dan siap dengan informasi-informasi termasuk pendukungnya yang berkaitan dengan program PNPM Mandiri Pedesaan⁶.

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

2. Sebagai Guru

fungsi sebagai seorang guru sering kali dibutuhkan untuk membantu masyarakat dalam mempelajari dan memahami keterampilan atau pengetahuan baru dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan program.

3. Sebagai Mediator

seorang fasilitator diharapkan dapat membantu masyarakat memediasi sehingga masyarakat biasa mengakses potensi-potensi dan sumber daya yang dapat mendukung pengembangan dirinya.

b. Tim Verifikasi

Adapun tugas pokok dari Tim Verifikasi ini adalah untuk melakukan pemeriksaan usulan kegiatan dan membuat rekomendasi kepada Musyawarah Antar Desa (AMD)⁷.

c. Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Kecamatan

UPK ini merupakan pihak yang langsung mengelola dari setiap program PNPM Mandiri Pedesaan. Adapun tugas umum dari UPK ini adalah sebagai berikut :

- a. Membantu sosialisasi program PNPM Mandiri Pedesaan
- b. Melakukan pembinaan administrasi di PNPM Mandiri Pedesaan dan kelompok pemanfaat
- c. Melakukan penagihan pengembalian Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sesuai rencana apabila terjadi tunggakan

⁷ *Ibid*

- d. Sebagai panitia penyelenggaraan kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan tingkat Kecamatan⁸.

Adapun UPK ini ada beberapa bagian serta tugas masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1. Ketua UPK, adapun tugas-tugasnya adalah sebagai berikut :
 - a. Memimpin rapat atau pertemuan UPK mewakili organisasi dalam pertemuan dengan aparat terkait.
 - b. Menandatangani surat-surat laporan, pencairan ke bank, pembukaan rekening, pencairan ke Desa, kuitansi-kuitansi dan perjanjian dengan pihak lain, dan dana pengembalian Simpan Pinjam Perempuan (SPP).
 - c. Menyetujui atau menolak pengajuan dana baik dari sekretaris, maupun bendahara⁹.
2. Sekretaris UPK, adapun tugas-tugas dari Sekretaris UPK ini adalah sebagai berikut :
 - a. Bertanggung jawab atas segala kearsipan dokumen baik yang menyangkut masalah keuangan, dan proses kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan.
 - b. Menempelkan dan memberi informasi tentang pertanggungjawaban keuangan, memberikan informasi kepada masyarakat melalui papan informasi.
 - c. Mencatat proses dan hasil keputusan rapat.

⁸ Dikutip dari *Standar Operasional dan Prosedur (SOP)*, PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bagkinang Seberang.

⁹ *Ibid*

- d. Mengisi dan mencatat agend harian.
- e. Bertindak sebagai humas apabila ketua UPK berhalangan
- f. Merencanakan pengadaan administrasi kantor dan membuat surta yang diperlukan untuk kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan.

3. Bendahara UPK, adapun tugas-tugas dari Bendahara UPK ini adalah sebagai berikut :

- a. Mencatat setiap transaksi keuangan
- b. Membuat laporan keuangan.
- c. Memegang dan menyimpan semua rekening dana PNPM Mandiri Pedesaan.
- d. Membuat perencanaan keuangan dan anggaran atas persetujuan ketua UPK.
- e. Mengisi form-form keuangan¹⁰.

¹⁰ *Ibid*

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Peran dan Cakupan Peran

1. Pengertian Peran

Peran ialah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh yang memiliki kedudukan dalam masyarakat¹. Peranan ialah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan². Pemeranan ialah proses cara atau perbuatan memahami perilaku yang diharapkan dan diaktikan dengan kedudukan seseorang³. Seseorang dikatakan berperan apabila dia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Peran dan kedudukan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Seseorang juga dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat. Jika seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya ada kecenderungan akan timbul suatu harapan yang baru. Dari harapan-harapan ini seseorang kemudian akan bersikap dan bertindak atau berusaha untuk mencapainya dengan cara dan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, peranan dapat juga didefinisikan sebagai kumpulan harapan yang terencana dari seseorang yang mempunyai status tertentu dalam masyarakat, dengan kata lain peranan dapat

¹ Pater Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Balai Pustaka, tth) h. 1132.

² *Ibid*

³ *Ibid*

dikatakan sebagai sikap dan tindakan seseorang sesuai dengan statusnya dalam masyarakat.

2. Cakupan Peran

Menurut Levinson, bahwa peran itu mencakup tiga hal, yaitu :

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan juga sebagai perikelakuan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat⁴.

B. Usaha Mikro Kecil Menengah

1. Pengertian dan Ciri-Ciri Usaha Kecil

Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang⁵.

Definisi usaha kecil menurut Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil adalah :

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Rajawali, 1982), h. 94.

⁵ Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN), h.33

“Kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan tahunan maksimal 1 Milyar dan memiliki kekayaan bersih, dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, paling banyak Rp. 200 Juta⁶”.

Pengertian lain tentang Usaha mikro kecil dan menengah menurut Undang-

Undang No. 20 tahun 2008⁷, menyebutkan :

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi criteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi criteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

⁶ Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, *Tentang Usaha Kecil*

⁷ Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, *Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah*

4. Usaha besar adalah badan ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia⁸.

Departemen keuangan memberi kriteria khusus mengenai usaha kecil yang termuat dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 316/KMK.616/1994 Tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam keputusan tersebut memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan usaha kecil adalah perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan usaha dengan omset per tahun setinggi-tingginya Rp. 600 juta⁹

Sedangkan menurut kategori Biro Pusat Statistik (BPS) usaha kecil identik dengan usaha kecil dan industri rumah tangga, BPS mengklasifikasikan industri berdasarkan jumlah pekerjaan, yaitu :

- a. Industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang
- b. Industri kecil dengan pekerja 5-19 Orang
- c. Industri menengah dengan pekerja 20-99 orang
- d. Industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih.

⁸ *Ibid*

⁹ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), h. 43.

Adapun ciri-ciri usaha kecil adalah :

- a. Pendidikan formal rendah
 - b. Modal usaha yang dibutuhkan relatif kecil
 - c. Upah rendah
 - d. Kegiatan usaha dalam ruang lingkup yang kecil¹⁰
2. Peran dan Fungsi Usaha Kecil

Usah kecil memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian bangsa yaitu :

- a. Penyediaan barang jualan
 - b. Penyerapan tenaga kerja
 - c. Pemerataan pendapatan
 - d. Nilai tambah bagi produk daerah
 - e. Peningkatan taraf hidup¹¹.
3. Kriteria-Kriteria Usaha Kecil Menengah

Dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil yang terdapat pada Bab III usaha kecil memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut :

- a. Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak 1 Milyar.

¹⁰ Martin, *Mengembangkan Usaha Kecil*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), h. 54.

¹¹ Faisal Basri, *Pembangunan Kritik dan Solusi Menuju Kebangkitan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), Cet. Ke-2, h. 6-7.

- c. Usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan atau cabang perusahaan yang memiliki, atau dikuasai, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah dan skala besar.

Menurut Dr. Euis Amalia, M.Ag dalam bukunya yang berjudul Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, bahwa kriteria-kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200 juta
- b. Milik warga Negara Indonesia
- c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai
- d. Bentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang tidak berbadan hukum¹².

4. Kelebihan, Kekurangan, serta Hambatan Usaha Kecil

a. Kelebihan usaha kecil dan menengah

Pada kenyataannya usaha kecil dan menengah mampu tetap bertahan dan mengantisipasi kelesuan perekonomian yang mengakibatkan inflasi maupun berbagai faktor penyebab lainnya. Tanpa subsidi dan proteksi usaha kecil di Indonesia mampu berperan sebagai *buffer* (penyangga) dalam perekonomian masyarakat lapisan bawah. Secara umum, perusahaan skala kecil baik perorangan maupun kerjasama memiliki kelebihan seperti :

¹² Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, op.cit, h. 46.

- a. Pemilik merangkap manajer perusahaan yang bekerja sendiri dan memiliki gaya manajemen sendiri, (merangkap semua fungsi manajerial seperti marketing, finance, dan adminidtrasi.
- b. Perusahaan keluarga, dimana pengelolaannya mungkin idak memiliki keahlian manjerial yang handal.
- c. Sebagian besar membuat lapangan pekerjaan baru, inovasi, sumber daya baru, serta barang dan jasa-jasa baru.
- d. Resiko usaha menjadi beban pemilik¹³.
- e. Pertumbuhan yang lambat, tidak teratur, terkadang cepat dan premature.
- f. Pleksibel terhadap bentuk fluktuasi jangka pendek, namun tidak memiliki rencana jangka panjang.
- g. Independen dalam penentuan harga produksi atau barang atau jasa-jasanya.
- h. Prosedur hukumnya sederhana.
- i. Pajak relatif ringan.
- j. Kontak-kontak dengan pihak luar bersifat pribadi.
- k. Mudah dalam proses pendiriannya.
- l. Mudah dibubarkan setiap saat jika dikehendaki.
- m. Pemilik mengelola secara mandiri dan bebas waktu.
- n. Pemilik menerima seluruh laba.

¹³ Harimurti, *Manajemen Usaha kecil*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 2009), h. 6.

Menurut Dr. Mulyadi Nitisusastro dalam bukunya yang berjudul *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil* bahwa kebaikan dan kekuatan usaha kecil adalah :

a. Dapat mengembangkan kreativitas usaha baru

Kreatifitas tidak selalu dilakukan dengan menampilkan suatu produk yang secara murni baru, namun dapat juga dilakukan dengan cara meniru produk yang telah beredar di pasar. Suatu produk baru dengan fitur lebih luas pada umumnya harus dibeli dengan harga yang lebih mahal. Pelaku usaha kecil sering melihat kondisi ini juga sebagai peluang usaha. Peluang usaha yang dimaksud berupa membuat produk tiruan dengan fitur yang relative sama atau sedikit berbeda dan tentu saja dengan harga yang jauh lebih murah.

b. Melakukan inovasi

Lazimnya dimasa sulit seseorang selalu berusaha menemukan solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi dengan cara yang berbeda. Dahulu kita jarang bahkan belum pernah menyaksikan seorang pedagang menjajakan rokok atau minuman dalam kemasan kepada para supir bus atau angkutan umum yang sedang menunggu giliran lampu hijau dipersimpangan lampu merah. Sekarang pemandangan seperti itu telah menjadi hal yang tidak aneh¹⁴.

c. Ketergantungan usaha besar terhadap usaha kecil

¹⁴ Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2010) Cet. Pertama, h. 38-39.

Pada umumnya produk yang dihasilkan perusahaan besar tidak selalu dikatakan agak sulit untuk menjangkau para pembeli kecil ditempat terpencil. Selain daerah terpencil sulit dijangkau, juga karena daya beli pembeli di daerah terpencil pada umumnya juga rendah. Guna menyiasati kondisi tersebut perusahaan besar mengemas produknya dalam kemasan kecil senilai kemampuan daya beli konsumen kecil.

d. Tidak ada pengaruh ketika terjadi krisis

Fakta membuktikan bahwa krisis ekonomi yang berlanjut kepada krisis kepercayaan yang terjadi pada tahun 1989, tidak berpengaruh terhadap eksistensi usaha kecil. Beberapa peneliti bidang ekonomi bahkan menyatakan tidak lumpuhnya sama sekali perekonomian Indonesia berkat jasa pelaku usaha kecil¹⁵.

Beberapa keunggulan dari usaha kecil dan menengah terhadap usaha besar antara lain adalah sebagai berikut :

1. Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
2. hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil.
3. kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerpannya terhadap tenaga kerja.
4. fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis.

¹⁵ *Ibid*

5. terdapatnya dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan.

Dari keunggulan-keunggulan tersebut yang menonjol adalah adanya kemampuan penyerapan tenaga kerja.

b. Kelemahan usaha kecil dan menengah

Berbagai kendala yang menyebabkan kelemahan serta hambatan bagi pengelola suatu usaha kecil dan menengah diantaranya masih menyangkit masalah internal dari usaha kecil dan menengah itu sendiri, serta beberapa faktor eksternal. Adapun kelemahan usaha kecil dan menengah itu seperti :

- a. Tidak memiliki perencanaan sistem jangka panjang.
 - b. Kekurangan informasi bisnis
 - c. Pembagian kerja tidak proporsional.
 - d. Kesulitan modal kerja
 - e. Resiko dan hutang-hutang kepada pihak ketiga ditanggung oleh kekayaan pemilik.
 - f. Sumber modal terbatas pada kemampuan pemilik
 - g. Perencanaan dan program pengendalian tidak ada atau belum pernah merumuskannya.
- c. Hambatan perkembangan usaha kecil**

Ada beberapa hal yang menyebabkan suatu usaha kecil mengalami hambatan dalam perkembangannya, yaitu :

1. lemahnya manajemen

2. keterbatasan kemampuan dalam penetrasi pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri.
3. kurangnya akses teknologi modern.
4. kurangnya akses ke bahan baku.
5. kurangnya akses untuk memperoleh modal¹⁶.

Selain beberapa hal diatas, hal lain yang menyebabkan kelemahan dari usaha kecil adalah karena kurangnya sumber daya. Kekurangan dibidang sumber daya ini merupakan hal yang sangat umum, keterbatasan tersebut bukan semata-mata dalam hal dana, peralatan fisik namun juga dalam hal informasi¹⁷.

5. Langkah Strategis Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Setidaknya ada empat target yang harus dicapai dalam pembenahan dan penguatan Usaha Kecil Menengah (UKM), yaitu:

- a. Meningkatkan produktivitas sehingga UKM memiliki daya saing yang tinggi
- b. Meningkatkan akses UKM pada jasa lembaga keuangan
- c. Memperbaiki manajemen internal UKM
- d. Memberikan jaminan/ iklim pemasaran yang efektif, sehat, dan berkesinambungan¹⁸.

¹⁶ Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000), h. 29.

¹⁷ Mulyadi Nutisusastro, *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil*, *op.cit*, h. 42.

¹⁸ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, *op.cit*, h. 322.

Disisi lain, Bank Indonesia juga mngeluarkan paket kebijakan UMKM yang disebut dengan paket Maret 2007, yaitu:

- a. Arah ekspansi kredit diharapkan lebih fokus pada kredit mikro kecil, yaitu maksimum kredit adalah Rp. 500 juta
 - b. Pembatasan ekspansi kredit korporasi melalui berbagai rambu-rambu ng ketat.
 - c. Meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan tetap
 - d. Menggalakkan program kemitraan antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat¹⁹.
6. Undang-Undang dan Peraturan Tentang Usaha Kecil Mikro Menengah
1. Undang-undang No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil
 2. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah.

C. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan

1. Pengertian PNPM Mandiri Pedesaan

Mulai tahun 2007 pemerintah Indonesia mencanangkan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serat PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Pedesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan²⁰. Adapun peraturan tentang pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan ini adalah Surat Menteri dalam Negeri

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan, h. 2.

No. 414.2/2634/PMD tanggal 29 Desember 2008 perihal petunjuk pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan.

1. Tujuan PNPM Mandiri Pedesaan

Tujuan dari PNPM Mandiri Pedesaan ini dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Tujuan umum

Tujuan umum PNPM Mandiri Pedesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

2. Tujuan khusus

Sedangkan tujuan khusus dari PNPM Mandiri Pedesaan ini ada beberapa hal, yaitu :

- a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantuan, dan pelestarian pembangunan.
- b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya local.
- c. Mengembangkan kapasitas pemerintah desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif.
- d. Menyediakan prasarana sosial dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat.
- e. Melembagakan pengelolaan dana bergulir

- f. Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).
- g. Mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskina pedesaan²¹.

2. Prinsip PNPM Mandiri Pedesaan

Sesuai dengan pedoma umum PNPM Mandiri Pedesaan mempunyai prinsipatau nilai-nilai dasar yang selalu yang menjadi landasan dan acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang aka di ambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Pedesaan. Prinsip-prinsip itu meliputi :

- a. ***Bertumpu pada pembangunan manusia***. Pengertian prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata.
- b. ***Otonomi***. Pengertian prinsip otonomi ini adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negative dari luar.
- c. ***Desentralisasi***. Pengertian prinsip ini adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan

²¹ *Ibid*

kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat.

- d. ***Berorientasi pada masyarakat miskin***. Pengertian prinsip ini adalah segala keputusan yang di ambil berpihak kepada masyarakat miskin.
- e. **Partisipasi**. Pengertian prinsip ini adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran dan dalam bentuk materi.
- f. ***Kesetaraan dan keadilan gender***. Pengertian prinsip ini adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati setiap manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik.
- g. ***Demokratis***. Pengertian prinsip ini adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat.
- h. ***Transparansi dan akuntabel***. Pengertian prinsip ini adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.

- i. ***Prioritas***. Pengertian prinsip ini adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan²².
- j. ***Keberlanjutan***. Pengertian prinsip ini adalah bahwa dalam setiap pengmbialn keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemeliharaaan kegiatan haru telah mempertimbangkan sistem pelestariannya²³.

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

BAB IV

PERANAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN TERHADAP PENINGKATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KECAMATAN BANGKINAG SEBERANG DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Peranan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Kecamatan Bangkinang Seberang dalam Upaya Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kec. Bangkinang Seberang

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan dan pengangguran ini lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan kerja bagi angkatan kerja di pedesaan. Upaya untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Sejalan dengan itu, pemerintah Indonesia telah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. PNPM Mandiri ini ada beberapa macam, diantaranya PNPM Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, dan lainnya.

PNPM Mandiri Pedesaan adalah program yang dicanangkan pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di Kecamatan Bangkinang Seberang ini mulai beroperasi sejak bulan Januari tahun 2008¹. Bagi masyarakat khususnya para pelaku UMKM, mereka sangat merasakan betul manfaat

¹ Muhammad Ihsan, SE (Ketua UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kec. Bangkinang Seberang), *Wawancara*, 28 April 2011.

dari program-program PNPM Mandiri ini, terutama untuk program dari dana yang dipinjamkan oleh PNPM Mandiri Pedesaan ini.

Adapun bentuk-bentuk program PNPM Mandiri Pedesaan ini adalah :

1. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar (pembangunan infrastruktur) yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin. Untuk program ini, prasarana dan sarana yang dipilih harus mendukung pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat atau peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan dalam bidang kesehatan dan pendidikan.
2. Peningkatan pelayanan bidang pendidikan (pemberian beasiswa kepada anak-anak yang termasuk keluarga yang kurang mampu) serta pelaksanaan program-program latihan untuk memberikan keterampilan kepada masyarakat. Adapun tujuan pokok dari pemberian beasiswa ini adalah supaya masyarakat yang kurang mampu, dapat menyekolahkan anak-anaknya layaknya anak-anak yang lain. Untuk program ini, pihak PNPM Mandiri Pedesaan memberikan beasiswa dalam bentuk membelikan kebutuhan-kebutuhan atau perlengkapan anak-anak tersebut. Seperti: sepatu, baju seragam, tas dan kebutuhan yang lainnya. Kemudian latihan-latihan untuk memberikan keterampilan kepada masyarakat. Pelatihan yang telah dilaksanakan adalah latihan membordir.
3. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (Simpan Pinjam Khusus Untuk Perempuan). Adapun tujuan pokok dari program ini adalah mengembangkan potensi simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan

usaha skala mikro, serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja. Tujuan lainnya adalah untuk memberikan kesempatan bagi kaum perempuan dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha.

Dari ke empat program di atas, program yang langsung berperan terhadap peningkatan UMKM adalah program penambahan permodalan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Untuk program simpan pinjam ini nilai plafond yang diberikan kepada setiap nasabahnya adalah Rp. 3000.000,. (tiga juta rupiah) atau sebesar pinjaman yang diajukan oleh nasabah².

Adapun jenis-jenis usaha yang bisa mengajukan pinjaman ke PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang seberang ini ada beberapa jenis, diantaranya pedagang gorengan, masyarakat yang memiliki warung, petani, pengusaha keramba, masyarakat yang memiliki usaha ternak ayam, dan usaha yang lainnya.

Adapun syarat yang diberikan oleh PNPM Mandiri Pedesaan untuk mendapatkan Simpan Pinjam ini adalah :

1. Dengan melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Dengan melampirkan photo copy Kartu Keluarga (KK)

² Muhammad Ihsan, SE (Ketua UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kec. Bangkinang Seberang), Wawancara, 28 April 2011.

3. Bahwa Simpan Pinjam Perempuan ini diajukan secara kolektif atau berkelompok³.

Untuk program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini setelah syarat-syarat dipenuhi oleh para peminjam, maka pengelola PNPM Mandiri Pedesaan akan memproses sampai dana pinjaman yang diajukan oleh masyarakat tersebut bisa dicairkan. Menurut pengelola PNPM Mandiri Pedesaan, bahwasanya selama program ini berjalan jika terjadi kredit macet atau kendala dalam pengembalian dana tersebut, maka untuk menutupinya dibayar terlebih dahulu oleh orang lain yang menjadi bagian dari kelompok peminjam tersebut, atau dengan cara menambah jangka waktu pengembaliannya⁴.

Adapun jangka waktu untuk pengembalian dana dari pinjaman yang dilakukan oleh nasabahnya ini adalah selama 1 tahun. Apabila nasabah yang telah melunasi pengembalian dana pinjaman ini, maka mereka diperolehkkan lagi untuk melakukan pinjaman ke PNPM Mandiri Pedesaan dan nilai plafondnya untuk pinjaman yang selanjutnya ini adalah maksimal sebanyak Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) atau sebanyak plafond yang diajukan nasabah⁵.

Adapun anggaran dana untuk operasional PNPM mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang sebarang tahun 2010 adalah sebanyak Rp. 2.250.000.000,- (Dua milyar

³ Purnomo, (Sekretaris UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kec. Bangkinang Sebarang), *Wawancara*, 28 April 2011.

⁴ Muhammad Ihsan, SE (Ketua UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kec. Bangkinang Sebarang), *Wawancara*, 7 Mei 2011.

⁵ Siti Khadijah, (Bendahara UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kec. Bangkinang Sebarang), *Wawancara*, 7 Mei 2011.

dua ratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan laporan keuangan penggunaan dana program PNPM Mandiri Pedesaan untuk tahun 2010 itu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IX
Tentang Laporan Keuangan
PNPM Mandiri Pedesaan Kec. Bangkinang Seberang Tahun 2010.

No	Keterangan	Jumlah Biaya(Rp.)	Fersentase
1.	Simpan Pinjam Khusus Perempuan	Rp. 531.000.000,-	23%
2.	Pemberian Beasiswa dan pelatihan	Rp. 222.672.050,-	10%
3.	Pembangunan Insfratraktur	Rp. 1.383.827.950,-	61%
4.	Operasional UPK	Rp. 112.500.000,-	6%
Jumlah		Rp. 2.250.000.000,-	100%

Sumber: Laporan Keuangan PNPM Mandiri Pedesaan Kec. Bangkinang Seberang Untuk Tahun 2010.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa, Rp. 531.000.000,- atau sekitar 23% dari anggaran PNPM Mandiri Pedesaan tahun 2010 dipergunakan untuk Simpan Pinjam Untuk Perempuan, sebanyak Rp. 222.672.050,- atau sekitar 10% dari anggaran PNPM Mandiri Pedesaan tahun 2010 dipergunakan untuk Pemberan Beasiswa dan Pelatihan, sebanyak Rp. 1.383.827.950,- atau sekitar 61% dari anggaran PNPM Mandiri Pedesaan tahun 2010 dipergunakan untuk Pembangunan Infrastruktur, serta sebanyak Rp. 112.500.000,- atau sekitar 6% dari anggaran PNPM Mandiri Pedesaan tahun 2010 dipergunakan untuk Operasional UPK.

Dari tabel diatas juga, dapat kita lihat bahwa untuk tahun 2010 proporsi dana PNPM Mandiri Pedesaan itu lebih banyak dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur yaitu sebanyak Rp. 1.383.827.950,- atau sekitar 61% dari total seluruh anggaran, sementara anggaran yang disalurkan untuk Simpan Pinjam untuk Perempuan hanya sebanyak Rp. 531.000.000,- atau sekitar 23%.

Berikut akan dipaparkan beberapa angket yang berkaitan dengan program PNPM Mandiri Pedesaan ini :

Tabel X
Tentang Berapa Lamanya Para Pelaku UMKM Menjalankan Usahanya

No	Keterangan	Responden	Persentase
1.	Kurang dari 1 tahun	4 Orang	9%
2.	1-3 Tahun	22 Orang	40%
3.	3 Tahun keatas	28 Orang	51%
Jumlah		54 Orang	100%

Sumber: Data Olahan

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa masyarakat terutama para pelaku UMKM mempunyai variasi waktu yang berbeda dalam menjalankan usahanya. Sebanyak 4 orang responden atau sekitar 9% menyatakan telah mulai menjalankan usahanya kurang dari 1 tahun, 22 orang responden atau sekitar 40% menyatakan telah menjalankan usahanya 1- 3 tahun, dan 28 orang responden atau sekitar 51% yang menyatakan bahwa mereka telah menjalankan usahanya diatas 3 tahun. Jadi, syarat

untuk mengajukan pinjaman ke PNPM Mandiri Pedesaan itu, maka kita harus terlebih dahulu memiliki usaha.

Melihat tabel diatas, dapat kita pahami bahwa masyarakat di Kecamatan Bangkinang Seberang ini telah banyak menjalankan usahanya bahkan mereka sudah sangat lama dalam menjalankannya.

Adapun tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program-program PNPM Mandiri Pedesaan ini, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel XI
Tentang Pengetahuan Masyarakat Dalam Mengetahui
PNPM Mandiri Pedesaan Kec. Bangkinang Seberang

No	Keterangan	Responden	Persentase
1.	Dari Tetangga	30 Orang	55%
2.	Dari Media Elektronik	—	0%
3.	Dari Kecamatan	24 Orang	45%
Jumlah		54 Orang	100%

Sumber: Data Olahan

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa masyarakat terutama para pelaku UMKM mempunyai sumber yang berbeda untuk mengetahui PNPM Mandiri Pedesaan. Sebanyak 30 orang responden atau sekitar 54% menyatakan dari tetangga, sebanyak 24 orang responden atau sekitar 45% menyatakan dari Kantor Kecamatan. Jadi dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan masyarakat mengetahui PNPM Mandiri Pedesaan ini adalah dari tetangga. Dari tabel ini dapat disimpulkan

bahwasanya sosialisasi yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Pedesaan masih belum optimal.

Tabel XII
Tentang Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Program-Program
PNPM Mandiri Pedesaan

No	Keterangan	Responden	Persentase
1.	Sangat Mengetahui	10 Orang	18%
2.	Mengetahui	28 Orang	52%
3.	Kurang Mengetahui	16 Orang	30%
Jumlah		54 Orang	100%

Sumber: Data Olahan

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa masyarakat terutama para pelaku UMKM mempunyai pengetahuan yang berbeda terhadap program-program yang ada di PNPM Mandiri Pedesaan. Sebanyak 10 orang responden atau sekitar 18% menyatakan sangat mengetahui, sebanyak 28 orang responden atau sekitar 52% yang menyatakan mengetahui, dan sebanyak 16 orang responden atau sekitar 30% yang menyatakan kurang mengetahui.

Tabel XIII
Tentang Sosialisasi yang dilakukan PNPM Mandiri Pedesaan
Kec. Bangkinang Seberang

No	Keterangan	Responden	Persentase
1.	Sudah Maksimal	24 Orang	45%
2.	Belum Maksimal	30 Orang	55%
3.	Ragu-Ragu/ Tidak Menjawab	—	0%
Jumlah		54 Orang	100%

Sumber: Data Olahan

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa responden atau masyarakat yang mengajukan pinjaman ke PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang mempunyai pandangan yang berbeda terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Pedesaan kepada masyarakat. Sebanyak 24 orang responden atau sekitar 45% menyatakan sosialisasinya sudah maksimal, dan sebanyak 30 orang responden atau sekitar 55% menyatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang seberang masih belum maksimal.

Tabel XIV
Tentang Pelayanan PNPM Mandiri Pedesaan Kec. Bangkinang Seberang

No	Keterangan	Responden	Persentase
1.	Memuaskan	42 Orang	74%
2.	Kurang Memuaskan	12 Orang	26%
3.	Ragu-Ragu/ Tidak Menjawab	–	0%
Jumlah		54 Orang	100%

Sumber: Data Olahan

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa masyarakat terutama para pelaku UMKM mendapatkan pelayanan yang berbeda ketika ingin mengajukan pinjaman ke PNPM Mandiri Pedesaan. Sebanyak 42 responden atau sekitar 74% menyatakan memuaskan, dan sebanyak 12 responden atau sekitar 26% menyatakan kurang memuaskan. Dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh

pengelola PNPM Mandiri Pedesaan Kec. Bangkinang Seberang, dirasakan telah memuaskan oleh para nasabahnya. Adapun pendapat responden mengenai syarat-syarat yang dibeikan oleh PNPM Mandiri Pedesaan bagi nasabah yang mengajukan pinjaman dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel XV
Tentang syarat-syarat yang diberikan PNPM Mandiri Pedesaan
Kec. Bangkinang Seberang

No	Keterangan	Responden	Persentase
1.	Tidak Memberatkan	44 Orang	81%
2.	Memberatkan	6 Orang	11%
3.	Cukup Memberatkan	4 Orang	8%
Jumlah		54 Orang	100%

Sumber: Data Olahan

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa sebanyak 44 orang responden atau sekitar 81% menyatakan bunga yang diberikan tidak memberatkan, sebanyak 6 orang responden atau sekitar 11% menyatakan memberatkan, dan sebanyak 4 orang responden atau sekitar 8% menyatakan cukup memberatkan dengan bunga yang diberikan. Jadi, dari tabel diatas, kebanyakan responden merasa tidak keberatan dengan adanya bunga dari pinjaman yang diberikan.

Adapun tentang jangka waktu pencairan dana dari pinjaman yang dilakukan oleh nasabah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel XVI
Tentang Jangka Waktu Pencairan Pinjaman/Kredit Yang Diajukan Nasabah
PNPM Mandiri Pedesaan Kec. Bangkinang Seberang

No	Keterangan	Responden	Persentase
1.	1-3 Bulan	35 Orang	65%
2.	4-6 Bulan	19 Orang	35%
3.	6 Bulan Keatas	-	0%
Jumlah		54 Orang	100%

Sumber: Data Olahan

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa sebanyak 35 orang responden atau sekitar 65% menyatakan prosedur pencairan dananya hanya selama 1 sampai 3 bulan, sebanyak 19 orang responden atau sekitar 35% menyatakan bahwa lama prosedur pencairan dananya berkisar selama 3 sampai 6 bulan, dan tida ada yang menyatakan di atas 6 bulan.

Adapun peminjam dana PNPM-SPP ini biasanya untuk mendapatkan pinjaman harus memenuhi syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan, antara lain:

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- b. Foto Copy Kartu Kelwarga (KK)
- c. Pinjaman diajukan secara kolektif atau kelompok

Adapun setelah memenuhi persyaratan tersebut di atas, dan setelah diajukan ke pihak PNPM Mandiri Pedesaan, maka pihak PNPM Mandiri Pedesaan akan memproses hingga pinjaman tersebut bisa dicairkan. Adapun kesesuaian permohonan nasabah tersebut dengan pencairannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel XVII
Tentang kesesuaian permohonan kredit yang diajukan nasabah PNPM Mandiri
Pedesaan Kec. Bangkinang Seberang

No	Keterangan	Responden	Persentase
----	------------	-----------	------------

1.	Sesuai	50 Orang	93%
2.	Dibawah Pengajuan	4 Orang	7%
3.	Tidak sesuai	—	0%
Jumlah		54 Orang	100%

Sumber: Data Olahan

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa sebanyak 50 orang responden atau sekitar 93% menyatakan bahwa permohonan pinjaman yang diajukan sesuai dengan pinjaman yang diberikan, sebanyak 4 orang responden atau sekitar 7% menyatakan bahwa pemberian pinjaman di bawah jumlah yang diajukan dan tidak ada yang menyatakan tidak sesuai.

Salah seorang peminjam dana yaitu Ibu Maryam mengungkapkan bahwa ia mengajukan pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,-, tetapi pinjaman yang Ibu Maryam dapatkan sebesar Rp. 1.500.000.-⁶.

Tabel XVIII
Kebijakan Pemerintah Terhadap PNPM Mandiri Pedesaan
Kecamatan Bangkinang Seberang

No	Keterangan	Responden	Persentase
1.	Sangat Baik	45 Orang	83%
2.	Cukup Baik	9 Orang	17%
3.	Biasa-Biasa Saja	—	0%
Jumlah		54 Orang	100%

Sumber: Data Olahan

⁶ Maryam, (Peminjam dana PNPM Mandiri Pedesaan), *Wawancara*, 10 Mei 2011

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa sebanyak 45 orang responden atau sekitar 83% menyatakan bahwa program PNPM Mandiri Pedesaan di Kec. Bangkinang Seberang ini sangat baik, sebanyak 9 orang responden atau sekitar 17% menyatakan bahwa program program PNPM Mandiri Pedesaan di Kec. Bangkinang Seberang ini cukup baik, dan yang menyatakan biasa-biasa saja tidak ada.

Dari tabel diatas kita dapat melihat, bahwa sesungguhnya bagi masyarakat Kecamatan Bangkinang Seberang, dengan adanya PNPM Mandiri Pedesaan ini sangat membantu mereka dalam meningkatkan usaha yang telah mereka jalankan dengan adanya pinjaman dari PNPM Mandiri Pedesaan itu.

B. Kendala-Kendala yang Dihadapi Oleh PNPM Mandiri pedesaan Dalam Upaya Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Bangkinang Seberang

Walaupun dengan adanya program PNPM mandiri Pedesaan ini sangat membantu masyarakat terutama para pelaku UMKM di Kecamatan Bangkinang Seberang, namun ada beberapa kendala yang terjadi yang menyebabkan kurang tercapainya kesejahteraan dan kemandirian bagi masyarakat terutama para pelaku UMKM untuk peningkatan usaha yang telah mereka jalankan. Adapun kendala- kendala tersebut adalah :

- a. Karena kurangnya keaktifan masyarakat terutama para pelaku UMKM dalam mengikuti pelatihan dan Musyawarah Antar Desa (MAD) yang diagendakan PNPM Mandiri Pedesaan. Ketika Musyawarah Antar Desa (MAD) ini

dilaksanakan, menurut pengelola PNPM mandiri Pedesaan banyak masyarakat yang tidak ikut serta/berpartisipasi mengikutinya.

Dalam pelaksanaan Musyawarah Antar Desa (AMD) ini, biasanya pengelola PNPM Mandiri Pedesaan bersama masyarakat akan membahas tentang usulan kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang ada di PNPM Mandiri Pedesaan. Kegiatan Musyawarah ini biasanya dilaksanakan di Kantor Camat.

Menurut M. Ihsan SE selaku ketua UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang bahwa setiap diadakannya kegiatan Musyawarah Antar Desa (AMD) ini, kebanyakan dari masyarakat terutama sekali para pelaku UMKM di Kecamatan Bangkinang Seberang sangat sedikit sekali yang ikut berpartisipasi mengikutinya.

- b. Karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan dana dari program PNPM Mandiri Pedesaan ini untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha yang telah mereka jalankan.

Kendala yang kedua ini terjadi karena kebanyakan masyarakat menganggap bahwa untuk mendapatkan dana pinjaman dari PNPM Mandiri Pedesaan ini sama susahnyanya dengan pinjaman yang diajukan di perbankan. Sehingga dengan hal tersebut, menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan dana pinjaman dari PNPM Mandiri Pedesaan ini.

Menurut Ibu Zubaidah yang merupakan salah seorang masyarakat di Kelurahan Pasir Sialang, bahwa dia hingga saat ini belum mendapatkan pemahaman tentang cara mengajukan pinjaman ke PNPM Mandiri Pedesaan ini. Padahal Ibu Zubaidah

tersebut juga membutuhkan dana tambahan untuk meningkatkan dari usaha berdaagang yang telah dia laksanakan.

- c. Karena masih belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak PNPM Mandiri Pedesaan kepada masyarakat⁷.

Hal ini disebabkan karena adanya beberapa orang dari pengurus atau pengelola PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Bangkinang Seberang ini, yang tidak tinggal menetap di wilayah tersebut dan juga karena wilayah Kecamatan Bangkinang Seberang yang sangat luas serta karena kesadaran masyarakat dalam mengikuti kegiatan Musyawarah Antar Desa (AMD) yang telah diagendakan oleh PNPM Mandiri Pedesaan.

- d. Menurut sebagian nasabah, yang menjadi kendala bagi mereka dalam meningkatkan usaha yang mereka jalankan adalah karena waktu pencairan dari dana yang mereka pinjam ke PNPM Mandiri Pedesaan masih terasa sangat lama. Dari tabel terdahulu dapat dilihat bahwa menurut masyarakat waktu pencairan dari pinjaman yang mereka ajukan ke PNPM Mandiri Pedesaan itu, untuk waktu pencairannya mereka harus menunggu lama bahkan ada yang sampai diatas empat bulan.

Menurut Ibu Maryam yang juga merupakan salah seorang nasabah dari PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang, bahwa ketika dia mengajukan pinjaman ke PNPM Mandiri Pedesaan, dana tersebut baru bisa dicairkan setelah

⁷ Muhammad Ihsan, SE (Ketua UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kec. Bangkinang Seberang), *Wawancara*, 28 April 2011.

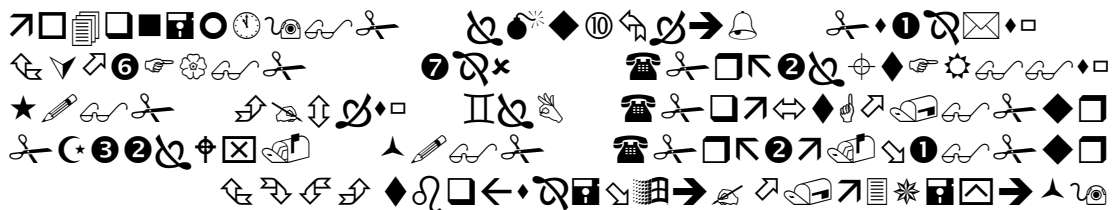
empat bulan selanjutnya. Walaupun demikian, Ibu Maryam tersebut setelah adanya dana pinjaman dari PNPM Mandiri Pedesaan ini bisa mendapatkan pendapatan yang lebih bila dibandingkan dengan sebelum dia mendapatkan pinjaman dari PNPM Mandiri Pedesaan tersebut.

Sedangkan menurut M. Ihsan SE yang merupakan salah seorang pengelola PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang, hal ini dilakukan karena mereka harus melihat dan menilai langsung terlebih dahulu terhadap usaha yang dijalankan oleh masyarakat yang mengajukan pinjaman ke PNPM Mandiri Pedesaan. Karena menurutnya, ada juga masyarakat yang mengajukan pinjaman, namun mereka tidak mempergunakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhannya.

C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Peranan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Dalam Upaya Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Bangkinang Seberang

Islam adalah agama yang tidak sempit terhadap perubahan dan perkembangan zaman, artinya segala perubahan dan perkembangan yang terjadi itu dapat diakomodir dengan catatan semua itu tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Terlebih lagi pada saat sekarang ini, dunia usaha semakin maju dan berkembang sehingga hal itu mengakibatkan tuntutan bagi umat Islam untuk menetapkan kejelasan status hukumnya, sebab terkadang permasalahan yang terjadi tidak dijelaskan secara terperinci.

Islam juga sangat menganjurkan supaya kita senantiasa untuk berusaha dan bekerja untuk mendapatkan rezki dari Allah SWT. Karena rezki itu tidak mungkin akan turun dengan sendirinya tanpa ada usaha kita untuk mendapatkannya. Ajaran agama kita yang mulia ini juga telah mengajarkan bahwa Allah SWT tidak akan mungkin merubah nasib suatu kaum atau masyarakat, hingga kaum atau masyarakat itu sendiri yang berusaha untuk merubahnya. Hal ini senada dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Jumuah ayat 10 yaitu sebagai berikut :



Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

Dan firman Allah SWT dalam surat Ar-Ra`du ayat 11 yaitu sebagai berikut :



Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.

Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, islam mempunyai sistem ekonomi yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist serta dilengkapi dengan Al-Ijma' dan Qiyas. Sistem ekonomi islam saat ini lebih dikenal dengan istilah sistem ekonomi syariah.

Fasilitas ekonomi syariah ini mempunyai beberapa tujuan diantaranya :

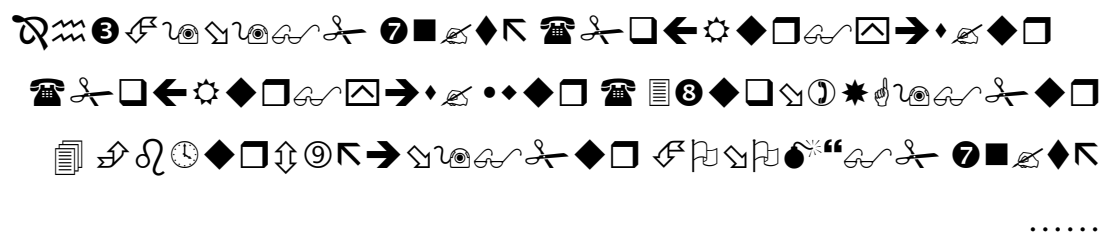
1. kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral islam.
2. membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid, berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal.
3. mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata.
4. menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.
5. ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem perekonomian syariah, yang memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berkonsep pada “*amar ma'ruf nahi munkar*” yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang⁸.

Walaupun dalam prakteknya di lapangan, bahwa untuk dana simpan pinjam ini menggunakan sistem bunga, namun bagi masyarakat yang mengajukan pinjaman mereka tidak diberatkan untuk pengembalian dana tersebut. Berbicara tentang bunga, dari dahulu sudah menjadi perdebatan dikalangan ulama dan cendekiawan muslim. Perbedaan pendapat tersebut muncul disebabkan oleh perbedaan metode dan analogi hukum yang digunakan. Misalkan, apakah bunga itu identik dengan riba?

Sebagai lembaga keuangan biasa yang juga bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba, maka program PNPM Mandiri Pedesaan ini terutama untuk program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) juga memberikan bunga pinjaman kepada peminjam.

⁸ Marza Gamal, *Aktivitas Ekonomi Syariah*, (Pekanbaru: Unri Press, 2004), h. 3.s

Dalam agama islam, membantu dan saling tolong-menolong adalah dianjurkan dan bisa menjadi wajib apabila disekitar kita ada orang yang sangat membutuhkan bantuan dari kita dalam hala kebaikan. Demikian juga halnya tolong-menolong dalam memberikan pinjaman atau hutang kepada orang yang sangat membutuhkan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Ma'idah ayat 2 :



Artinya : “dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”⁹.

Dilihat dari tujuan penyaluran pinjaman untuk perempuan-perempuan yang mempunyai usaha dan mereka mengalami kekurangan modal, dan berdasarkan ayat diatas, maka sangatlah tepat dan searah dengan tujuan ekonomi islam untuk membantu kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, karena pada dasarnya pinjaman ini diberikan untuk membantu usaha perempuan yang mengalami kekurangan modal dan ingin mengembangkan usahanya, serta bukan hanya semata-mata untuk mencari keuntungan dalam berbisnis sebagai tujuan utamanya.

Menurut buk Eti yang merupakan salah seorang nasabah dari PNPM Mandiri Pedesaan, bahwa semenjak dia mendapatkan pinjaman dari PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang ini maka usahanya mengalami peningkatan.

⁹ Departemen Agama RI, *log.cit*, h. 156.

Menurutnya juga, bahwa sebelum adanya dia mendapatkan pinjaman dari PNPM Mandiri Pedesaan, rata-rata pendapatan Ibu Eti itu berkisar antara Rp. 75.000,- sampai Rp. 125.000,- tetapi setelah usahanya meningkat dengan adanya tambahan modal dari pinjamannya ke PNPM Mandiri Pedesaan tersebut, maka sekarang rata-rata pendapatan Ibu Eti itu meningkat menjadi Rp.170.000,- bahkan kadang-kadang pendapatannya mencapai Rp. 215.000,-¹⁰.

Islam menganjurkan kepada kita bahwasanya umat islam itu sendiri harus kuat dalam perekonomiannya supaya mereka khsuyu' dalam menjalankan ibadahnya kepada Allah SWT. Karena Nabi kita sendiri pernah mengatakan bahwasanya kemiskinan akan membawa umatnya kepada kekufuran, dan juga Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk kuat dalam perekonomiannya, dengan maksud supaya lebih banyak membantu dan khusyu' dalam beribdah kepada sang penciptaya yaitu Allah SWT.

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya dasar pengharaman riba adalah kezaliman dan ketidakadilan terhadap pinjaman tersebut. Dari penelitian yang penulis lakukan, bahwasanya masyarakat yang mendapat pinjaman dana mengatakan tidak merasa berat dalam mengembalikan pinjaman tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwasanya nasabah mengatakan ada bunga dalam pengembalian dana pinjaman yang diberikan, namun masyarakat yang mendapatkan pinjaman tidak merasa berat dengan bunga yang ditetapkan tersebut.

¹⁰ Eti, Nasabah PNPM Mandiri Pedesaaan Tahun 2010, *Wawancara* Tanggal 6 Juni 2011

Hal ini karena masyarakat merasa terbantu dengan adanya pinjaman ini, karena mereka bisa mengembangkan usaha mereka dengan modal dari pinjaman tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penjabaran penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Dari beberapa program yang ada di PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang yang mempunyai peranan langsung terhadap peningkatan UMKM adalah Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Karena dengan adanya pinjaman ini, masyarakat khususnya para pelaku UMKM dapat mengembangkan usaha yang telah dijalankan dengan adanya tambahan modal.
2. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala dalam peningkatan UMKM di Kecamatan Bangkinang Seberang ini antara lain karena masih kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Pedesaan, karena waktu pencairan pinjaman yang diajukan masih terasa lama oleh masyarakat, selain dari itu, faktor lainnya adalah karena kurangnya keaktifan masyarakat dalam mengikuti musyawarah yang telah diagendakan oleh PNPM Mandiri Pedesaan serta karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan dana pinjaman dari PNPM Mandiri pedesaan ini.
3. Adapun tinjauan ekonomi islam terhadap program PNPM Mandiri Pedesaan dalam upaya peningkatan UMKM di Kecamatan Bangkinang Seberang

khususnya simpan pinjam Perempuan ini adalah baik, karena di dalam pemberian pinjaman terdapat unsur tolong menolong antara pihak pemberi pinjaman kepada pihak yang meminjam dana (masyarakat). Dan masyarakat yang meminjam tidak merasa diberatkan dengan balas jasa yang diberikan.

B. Saran

Dengan adanya PNPM Mandiri Pedesaan ini yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam peningkatan UMKM di Kecamatan Bangkinag seberang, maka setelah penulis melakukan penelitian ada beberapa rekomendasi yang penulis sarankan yang bersifat konstruktif sebagai acuan bagi pengelola PNPM Mandiri Pedesaan agar kedepannya diharapkan PNPM Mandiri Pedesaan ini lebih dapat berperan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pedesaan serta lebih optimal lagi dalam upaya peningkatan UMKM di Kec. Bangkinang Seberang, seperti :

1. Agar waktu pencairan pinjaman yang diajukan masyarakat khususnya para pelaku UMKM lebih dipercepat lagi waktu pencairannya.
2. Agar kedepannya PNPM Mandiri Pedesaan lebih optimal lagi dalam mensosialisasikan program-programnya kepada masyarakat. Sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat dengan adanya program ini.
3. Mengembangkan program ini dengan program-program lain yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih banyak lagi, agar lebih banyak masyarakat yang merasakan hasil dan manfaat dari program ini.

4. Saran kepada pemerintah, agar proporsi anggaran untuk simpan pinjam yang hanya sekitar 23% dari total keseluruhan anggaran PNPM Mandiri Pedesaan perlu untuk ditingkatkan minimal 40%. Hal ini dibutuhkan supaya upaya pemberdayaan dan peningkatan dari usaha mikro menjadi kecil, dari kecil menjadi menengah dan dari menengah menjadi besar bisa terwujud, sehingga pada akhirnya kesejahteraan masyarakat bisa diraih.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Euis, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009.
- Basri, Faisal, *Pembangunan Kritik dan Solusi Menuju Kebangkitan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Sinar Baru Lagesindo, 2007.
- Departemen Dalam Negeri, *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan*, Jakarta: 2007.
- Eti (nasabah PNPM Mandiri Pedesaan) *Wawancara* Hari Kamis Tanggal 10 Januari 2010
- Gamal, Marza, *Aktivitas Ekonomi Syariah*, (Pekanbaru: Unri Press, 2004),
- Hakim, Abdul, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta : Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004.
- Harimurti, *Manajemen Usaha kecil*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 2009.
- Ihsan, Muhammad, *Ketua UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kec. Bangkinang seberang*
- Kuncoro, Mudjarad, *Ekonomi Industri Indonesia Menuju Negara Industri 2030*, Yogyakarta : CV Andi Offset, 2007.
- Khadijah, Siti, *Bendahara UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kec. Bangkinang Seberang*
- Lapcham, Ronald, *Pengusaha Kecil dan Menengah di Asia Tenggara*, Jakarta : LP3ES Anggota IKPI, 1991.
- Martin, *Mengembangkan Usaha Kecil*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.
- Mawardi, *Ekonomi Islam*, Pekanbaru : Alaf Riau, 2007.
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

- Nutisusastro, Mulyadi, *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2010).
- Purnomo, *Sekretaris UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kec. Bangkinang Seberang*
- Salim, Pater, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Balai Pustaka, tth.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Rajawali, 1982.
- Sumodiningrat, Gunawan, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 1998.
- Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2003.
- Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000.
- Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 dan Undang- Undang No. 20 Tahun 2008, *Tentang Usaha Kecil, Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah*